

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang berkaitan dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum laki-laki sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab dari tindakan yang dilakukan oleh individual maupun secara berkelompok. Kekerasan seksual di Mesir mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dalam kurun waktu beberapa tahun masa pemerintahan Mohammed Mursi.

Sebuah studi oleh Pusat Mesir untuk Hak-hak Perempuan pada tahun 2008 menemukan lebih dari 80 % dari kaum perempuan Mesir mengalami pelecehan seksual.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun 2009 lalu oleh pemerintah bahwa 1.010 perempuan Mesir yang ada, 83% pernah mengalami pelecehan seksual. Lebih dari

---

<sup>1</sup> *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. di akses 23/06/2013  
<http://xa.yimg.com/kq/groups/23699961/214725831/name/kekerasan>

<sup>2</sup> *Pakai Jilbab Masih Dilecehkan*. di akses 23/06/2013  
<http://reformata.com/news/view/6928/pakai-jilbab-masih-dilecehkan>

setengahnya kaum perempuan itu mendapatkan perlakuan yang sama dan dilakukan hampir setiap hari.<sup>3</sup> Pada tahun 2012, Direktorat umum polisi moral di Kementerian Dalam Negeri menyatakan adanya 9.468 kasus pelecehan terhadap kaum perempuan pada tahun lalu. Sebanyak 329 kasus adalah kekerasan seksual dan 112 adalah kasus pemerkosaan.<sup>4</sup>

Dapat kita ambil contoh kasus pada Oktober 2012 lalu hampir setiap harinya di Mesir terjadi kasus pelecehan seksual terhadap kaum perempuan secara terbuka, baik itu dilakukan oleh individu atau berkelompok. Dalam sasarannya, para pelaku tidak memberikan perbedaan apapun. Meskipun sebagian besar kaum perempuan di Mesir mengenakan hijab, namun mereka tetap banyak yang mengalami pelecehan seksual. Hijab atau bahkan sehelai kain yang menutupi seluruh wajahnya yang biasa disebut dengan niqab sekalipun tetap saja akan menjadi target pelecehan.<sup>5</sup> Hal ini dibuktikan oleh Waled Hammad yang merupakan seorang aktor ternama di Mesir yang berusaha untuk menyelidiki kasus ini. Kaum perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual disebabkan karena adanya persepsi buruk kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dimana kejadian itu sering kali dilakukan oleh kaum pria terhadap kaum perempuan yang mengenakan hijab ataupun tidak. Pendapat tersebut didasarkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Waled Hammad dengan cara menyamar menjadi perempuan.

---

<sup>3</sup> NU Online : *Mesir Berupaya Perangi Pelecehan Seksual*. Di akses 26/05/2013

<sup>4</sup> *Perempuan Mesir makin sering dianiaya*. di akses 23/06/2013  
<http://www.merdeka.com/dunia/perempuan-mesir-makin-sering-dianiaya.html>

<sup>5</sup> *Pakai Jilbab Masih Dilecehkan*. di akses 23/06/2013  
<http://reformata.com/news/view/6928/pakai-jilbab-masih-dilecehkan>

Dalam melakukan penyamarannya, Waled Hammad menggunakan berbagai macam teknik tata rias wajah untuk membuktikan persepsi tersebut. Hasilnya, berdasarkan penelitian adalah benar. Kaum pria yang bertemu di tempat umum pada saat Waled Hammad berpenampilan seperti kaum perempuan, kaum pria tersebut langsung melakukan aksinya dengan mengeluarkan siulan dan memandangi tubuh Waled Hammad dari atas sampai bawah dan mengeluarkan komentar yang bernada pelecehan seksual. Bahkan pada saat Waled Hammad mengenakan hijab, ada seorang pria yang mendekatinya dan menawarkan untuk berhubungan seks dengan harga 4.000 pound Mesir atau Rp 5,75 juta rupiah per malam.<sup>6</sup>

Equality atau persamaan (hak) ini memiliki arti yakni menghargai atau menghormati hak orang lain untuk dapat bebas hidup dan berkarya.<sup>7</sup> Ketika isu-isu hanya terkait dengan perempuan, banyak kaum pria yang menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk mempunyai rasa peduli sehingga terjadi *disequality* terhadap perempuan dalam hal kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada kaum perempuan di Mesir. Kaum perempuan bukanlah minoritas. Setengah penduduk suatu negara adalah kaum perempuan. Karena itu, hak dan tanggung jawab perempuan bukanlah masalah kecil, melainkan masalah nasional bahkan Internasional.

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap kaum perempuan yang terjadi di Mesir pada tahun terakhir ini menjadikan sebuah pertanyaan besar

---

<sup>6</sup> *Perempuan Mesir Rentan Jadi Korban Pelecehan Seksual*. Di akses 28/05/2013

<http://www.rimanews.com/read/20130512/102302/perempuan-mesir-rentan-jadi-korban-pelecehan-seksual>

<sup>7</sup> *Definisi Equality*. Diakses 20/04/2013

<http://nataram.activeboard.com/t14681507/apa-sebenarnya-unity-equality-itu/>

tentang peran Pemerintah Mesir saat ini dalam menghadapi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Berdasarkan hal ini penulis mengambil judul :

**“KEGAGALAN MURSI DALAM MENGATASI *INEQUALITY* TERHADAP PEREMPUAN”**

**B. Tujuan Penulisan**

Kegiatan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mengenai sistem pemerintahan Presiden Mursi terhadap perempuan dan hal apa yang mendasari terjadinya *Inequality* terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual yang ada di Mesir. Hal ini sekaligus memberikan wawasan baru mengenai kajian studi Ilmu Hubungan Internasional.

Selain itu tujuan penulisan ini yakni untuk melengkapi tugas akhir penulis setelah menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, yang akan di jadikan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**C. Latar Belakang Masalah**

*Equality* atau persamaan (hak) adalah yang diharapkan kaum perempuan Mesir terhadap kaum laki-laki, *equality* ini memiliki arti yakni menghargai atau

menghormati hak orang lain untuk dapat bebas hidup dan berkarya.<sup>8</sup> Ketika isu-isu hanya terkait dengan perempuan, persoalan yang menyangkut status, dan perlakuan syari'ah terhadap perempuan di Dunia Islam telah mendapatkan perhatian yang sangat luas, dari kalangan *insider* (muslim sendiri) ataupun *outsider* (sarjana barat). Hal ini bermula dari sebuah fakta bahwa kaum perempuan di Negara Muslim belum mendapatkan status "*penuhi*" dibanding kaum laki-laki.

Akibatnya, kaum perempuan sering termarginalkan dalam berbagai sektor kehidupan. Berawal dari masalah tersebut, di kalangan pemikir muslim memunculkan pemikiran dan gerakan yang menggugat ketidakadilan gender, baik yang disuarakan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Gerakan ini bertumpu demi menginginkan adanya equality atau persamaan (hak), peningkatan status dan peran sosial perempuan. Gerakan Feminisme yang menuntut kesamaan gender semakin menjustifikasi di negara-negara muslim, dan tak terkecuali negara Mesir.<sup>9</sup> Banyak kaum pria yang menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk mempunyai rasa peduli sehingga terjadi *disequality* terhadap perempuan di Mesir.

Kekerasan yang terjadi pada masa pemerintahan Hosni Mubarak dapat diambil contoh pertama dalam bidang sosial budaya yaitu: pada tahun 2006, Pusat Hak-Hak Perempuan telah melakukan studi bahwa lebih dari 80 persen perempuan Mesir mengalami pelecehan seksual secara verbal maupun fisik setiap

<sup>8</sup> *Definisi Equality*. Diakses 20/04/2013  
<http://mataram.activeboard.com/t14681507/apa-sebenarnya-unity-equality-itu/>

<sup>9</sup> *Quo Vadis Feminisme Timur Tengah: Dilema Gerakan Wanita Di Mesir*. (Buku : Menolak Subordinasi Menyeimbangkan Relasi). Di akses 25/06/2013  
[http://www.academia.edu/3455630/Quo\\_Vadis\\_Feminisme\\_Timur\\_Tengah\\_Dilemma\\_Gerakan\\_Wanita\\_di\\_Mesir](http://www.academia.edu/3455630/Quo_Vadis_Feminisme_Timur_Tengah_Dilemma_Gerakan_Wanita_di_Mesir)

harinya. Keterbatasan ruang gerak sangat dialami oleh kaum perempuan dalam kesehariannya. Rezim otoriter telah menguasai Mesir pada saat itu dan sistem politik yang ada yakni sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden.<sup>10</sup>

Pada tahun 2008, sebuah studi telah dilakukan oleh Egyptian Center for Women's Rights yang membuktikan bahwa kurang lebih dari 80 persen kaum perempuan di Mesir mengalami pelecehan seksual dan sebagian besar korbannya adalah wanita muslim yang menggunakan hijab bahkan yang mengenakan sehelai kain penutup muka atau niqab.<sup>11</sup> Mengingat bahwa setiap manusia berhak mendapatkan haknya, maka seorang perempuan juga berhak mendapatkan haknya. Kaum perempuan adalah sebagai kaum yang bukanlah minoritas dalam suatu negara, karena setengah penduduk suatu negara adalah kaum perempuan.<sup>12</sup>

Yang kedua, dalam pemerintahan Mubarak bukan hanya dalam bidang sosial budaya melainkan dalam bidang politik yaitu: dalam dunia politik pun kaum perempuan mengalaminya seperti menurut studi yang dilakukan oleh anggota parlemen perempuan di Mesir yang mengungkapkan bahwa 68% peran kinerja anggota parlemen perempuan tersebut tidak memuaskan. Pada rezim Mubarak hanya terdapat kuota 20% bagi perempuan untuk menduduki

---

<sup>10</sup> *Sistem Pemerintahan Dan Politik Negara-Negara Timur Tengah*. Di akses 24/06/2013  
<http://semutuyet.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-dan-politik-negara.html>

<sup>11</sup> *Setiap Hari Wanita Mesir Mengalami Pelecehan Seksual*. Di akses 30/05/2013  
<http://health.detik.com/read/2012/09/05/122509/2008525/763/setiap-hari-wanita-mesir-mengalami-pelecehan-seksual>

<sup>12</sup> *Kilas Balik~ Perempuan dalam Revolusi Arab: isu mereka adalah isu kita semua*. Di akses 24/06/2013  
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=32698&lan=ba>

parlemen.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kecilnya jumlah anggota parlemen perempuan di negara Timur Tengah khususnya Mesir, kecilnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta lemahnya perencanaan strategi bagi partisipasi perempuan dalam dunia politik.<sup>14</sup> Sebenarnya manusia di ciptakan oleh Tuhan untuk berpasangan dalam gender<sup>15</sup> seperti kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mengandung makna adanya peran, tugas, dan kedudukan yang melekat masing-masing dengan melihat perbedaan yang dimiliki.

Pada masa pemerintahan Mubarak, hanya kaum perempuan yang berasal dari kalangan menengah keatas yang dapat diperbolehkan untuk mengikuti aktivitas politik. Namun demikian, perempuan tidak dilihat sebagai anggota yang penting dalam aktivitas politik. Aktivitas politik perempuan hanya berkisar pada tindakan amal serta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dikemukakan sebuah fakta bahwa kaum perempuan di Mesir dalam kewarganegaraan dan hak-hak politiknya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1956, namun yang terjadi pada lingkungan sosial dan ekonomi di negara tersebut berjalan menentang hak-hak politik kaum perempuan tersebut.<sup>16</sup>

ketiga, Dalam dunia kerja, aktivitas ekonomi akan membuat manusia lebih bersemangat dan bergairah selain juga memacu kreativitas dan kematangan. Tiga

<sup>13</sup> *Dua Tahun Pasca-Revolusi Mesir, Perempuan Mesir Masih dalam Keterpurukan Seperti pada Era Mubarak*. Di akses 18/062013

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/01/48840/>

<sup>14</sup> *Mencari Kekuasaan Politik-Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon*. Di akses 31/05/2013

[http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS\\_Egypt\\_Lebanon\\_Jordan.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf)

<sup>15</sup> *Paradigma Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Di Dunia Kerja Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Islam, Kebijakan Negara Dan Realitas* (Selamat Riyadi). Di akses 15/06/2013

<sup>16</sup> *Mencari Kekuasaan Politik —Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon*. Di akses 25/06/2013

[http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS\\_Egypt\\_Lebanon\\_Jordan.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf)

periode masa pemerintahan Mubarak sudah membawa perbaikan bagi Mesir. Namun, pada beberapa tahun selanjutnya terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Di sisi lain dalam dunia kerja, kaum perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai pekerjaan, terlebih yang mengenakan hijab bahkan niqab.<sup>17</sup>

Sebagai komunitas yang jumlahnya sekitar setengah dari populasi manusia di dunia, kaum perempuan juga punya hak untuk bekerja dan beraktivitas. Dengan terlibat dalam aktivitas ekonomi, kaum perempuan selain dapat meningkatkan kemampuannya juga bisa memainkan peran dalam memperbaiki kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah Mesir mempunyai kewajiban untuk membuka peluang bagi aktivitas kaum perempuan di berbagai bidang. Kaum perempuan seharusnya dapat melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya.<sup>18</sup> Namun, di Negara Mesir peran perempuan sangat terbatas sehingga hanya bisa melakukan kegiatan di rumah karena sangat sedikit lapangan pekerjaan yang mau menerima kaum perempuan.

Pasca runtuhnya rezim Mubarak pada akhir Februari 2011, terjadi adanya pemilihan Presiden. Rakyat Mesir memilih Mohamed Mursi yang merupakan calon dari Ikhwanul Muslimin yang merupakan sebuah organisasi agama islam yang religius dengan tujuan menyebarkan islam dan berakhlak mulia. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al Banna di Mesir pada 1928. Sejak organisasi ini berdiri

---

<sup>17</sup> *Ekonomi Memburuk, Musuh Utama Mubarak*. Di akses 25/06/2013  
<http://www.antaraneews.com/print/245140/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

<sup>18</sup> *Muslimah Dan OKI*. Di akses 24/06/2013  
[http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset\\_publisher/QqB7/content/id/4899215/pop\\_up?\\_101\\_INSTANCE\\_QqB7\\_viewMode=print](http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/4899215/pop_up?_101_INSTANCE_QqB7_viewMode=print)

sasarannya adalah sosial dan politik, namun berbasis islam.<sup>19</sup> Gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, memiliki ideologi bahwa adalah Islam itu sendiri. Yakni, Islam yang berasal dari Allah SWT, Al Quran sebagai pedoman hidup, dan diturunkan untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali.<sup>20</sup>

Dalam pemilu yang berlangsung saat itu, ia memberikan janji dengan tegas di depan semua orang terutama Tokoh Perempuan. Dalam isi pidato dijelaskan bahwa ia akan menjadikan kaum perempuan untuk ikut serta dalam lingkungan eksekutif pemilihan Presiden tersebut, karena kaum perempuan memiliki peran besar dalam "*Proyek Kebangkitan*". Ia juga telah memberikan sebuah apresiasi kepada kaum perempuan yang berhasil dalam mengangkat kesulitan dan beban hidup di keluarga Mesir, karena hal ini merupakan langkah awal nyata bagi kemajuan Mesir. Mursi juga menambahkan bahwa kaum perempuan di Mesir itu lazimnya sama seperti warga Mesir lainnya, kaum perempuan mesir mempunyai hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki sebagaimana kewajibannya. Mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa mendapatkan diskriminasi dari penguasa sebelumnya.<sup>21</sup>

Menurutnya, kaum perempuan mampu menyelesaikan banyak permasalahan dan ia juga menegaskan bahwa dirinya mempunyai program ketahanan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan seperti yang telah di paparkan di atas dan agar kaum perempuan

---

<sup>19</sup> *Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin*. 25/06/13

<http://agendapamel.wordpress.com/politik-islam/pemikiran-politik-ikhwanul-muslimin/>

<sup>20</sup> *Masa Depan Ikhwanul Muslimin*. Di akses 25/06/2013

<http://www.eramuslim.com/berita/analisa/masa-depan-ikhwanul-muslimin.htm>

<sup>21</sup> *Capres Mursi; Perempuan Andil Besar dalam Proyek Kebangkitan Mesir*. 16/07/13

<http://al-ikhwan.net/akhbar-ikhwan/capres-mursi-perempuan-andil-besar-dalam-proyek-kebangkitan-mesir.html>

memiliki peran yang besar dalam membangun masyarakat. Disini ia juga menjawab atas tuduhan yang di berikan kepadanya bahwa loyalitas dirinya hanya untuk kelompoknya, maka Mursi menegaskan bahwa loyalitas saat ia telah menjadi Presiden adalah untuk rakyat yang telah memilihnya. Ia juga akan mewadahi kaum perempuan bukan hanya dalam satu wadah saja, tidak seperti yang dilakukan oleh Pemimpin sebelumnya.

Dalam melindungi kaum perempuan saat ini tidak cukup hanya dengan satu organisasi, oleh karena itu Mursi akan bekerja untuk membangun ketahanan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dengan cara menyertakan organisasi swasta yang ada ditengah-tengah masyarakat dan memberdayakan organisasi tersebut untuk membangun masyarakat terutama kaum perempuan secara bersama-sama. Ia juga mengapresiasi agar kaum perempuan ikut serta dalam pemilihan Presiden sebagaimana saat mereka mendukung revolusi 25 Januari 2011 lalu yang berkontribusi besar dalam gerakan tersebut serta Mursi juga ingin menjawab tuduhan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa kaum perempuan mesir itu "*bodoh*", namun tidak dibenarkan karena selama sejarah revolusi dan pemilu bahwa kaum perempuan turut andil besar menyukseskannya.<sup>22</sup>

Setelah terpilihnya Mohammed Mursi menjadi Presiden Mesir pasca runtuhnya rezim Mubarak, hanya sebagian peran yang bisa membuat kaum perempuan merasa dihargai atau diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan oleh Presiden Mohammed Mursi. Pertama, terjadi dalam bidang ekonomi pada dunia kerja. Sekitar beberapa bulan yang lalu, telah di beritakan oleh surat kabar

---

<sup>22</sup> Capres Mursi : Perempuan Andil Besar dalam Proyek Kebangkitan Mesir. Di akses 17/06/2013 <http://al-ikhwan.net/akhbar-ikhwan/capres-mursi-perempuan-andil-besar-dalam-proyek-kebangkitan-mesir.html>

bahwa Pemerintah Mesir akhirnya mulai memperbolehkan kaum perempuan yang mengenakan hijab untuk dapat melakukan pekerjaan seperti presenter televisi di Mesir menggunakan hijab di stasiun televisi pemerintah dan di lain hal, sebuah maskapai penerbangan yang ada di Mesir telah menunjuk sebuah perusahaan asing untuk mendesain topi dan jilbab bagi 250 pramugari. Perusahaan maskapai penerbangan EgyptAir mulai mengambil langkah baru dengan mengizinkan pramugarinya mengenakan jilbab selama bertugas. Kewajiban mengenakan jilbab, merupakan arahan dari para ulama setempat yang mengatakan jika hal tersebut adalah kewajiban bagi kaum perempuan.<sup>23</sup>

Kedua, dalam bidang politik Presiden Mohammed Mursi sudah menandatangani konstitusi baru yang mana Konstitusi baru di Mesir memberikan penekanan lebih pada hukum syariah, tidak secara eksplisit melarang diskriminasi gender, dan memperbesar wewenang militer<sup>24</sup> serta ide-ide dalam konstitusi baru mencakup masalah perlindungan kaum minoritas, hak politik, dan hak perempuan.<sup>25</sup> Kaum perempuan Mesir telah memiliki kebebasan dalam mengeluarkan aspirasinya, namun pada masa pemerintahan Mursi ini tingkat keterlibatan kaum perempuan dalam menduduki kursi parlemen turun hingga 12,7% bahkan menjadi di bawah 2%. Pada Masa pemerintahan Mursi hanya ada sekitar 10 perempuan di parlemen Mesir yang beranggotakan 508 orang.

---

<sup>23</sup> Mursi Izinkan Presenter Berjilbab di Mesir. Di akses 25/06/2013

<http://infoberitamedia.blogspot.com/2013/03/mursi-izinkan-presenter-berjilbab-di.html>

<sup>24</sup> Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama. Di akses Di akses 28/05/2013

<http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html>

<sup>25</sup> Konstitusi Baru Mesir Jamin HAM, Hak Minoritas, dan Perempuan. di akses 27/05/2013

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/27/mfntwo-konstitusi-baru-mesir-jamin-ham-hak-minoritas-dan-perempuan>

Perempuan memiliki peran penting dalam partisipasi politik, namun peran itu tidak diwujudkan dalam partisipasi nyata dalam politik.

Ketiga, aksi gangguan terhadap perempuan yang masih belum stabil terjadi pada masa pemerintahan Mursi sangat mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di Mesir. Dua tahun berjalan semenjak Revolusi Mesir itu terjadi, peristiwa sejarah ini belum juga mengantarkan harapan dan aspirasi ribuan perempuan. Banyak yang mengatakan bahwa hanya melihat kemajuan kecil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal keamanan fisik dan bahkan nasib perempuan semakin buruk. Kelompok hak asasi mengatakan kepada banyak pihak bahwa kekerasan terhadap perempuan di Mesir saat ini telah meningkat.

Hal ini diharapkan bahwa pemerintah dapat bertindak tegas dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Serangan seksual terhadap kaum perempuan terjadi di mana-mana. Kaum perempuan ini merasa dilecehkan dengan adanya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin marak di Mesir. Pada pemerintahan Mursi, pelecehan terhadap perempuan di Mesir dilakukan tidak hanya oleh individual bahkan sudah menjadi berkelompok atau biasa yang disebut "*geng pemerkosa*" yang terjadi akhir Januari 2013. Ada pula seorang menteri yang dinilai sangat melecehkan perkataannya saat menjawab pertanyaan dari jurnalis perempuan saat mewawancarainya. Salah Abdul Maksoud yang merupakan Menteri Penerangan di Mesir menjawab pertanyaan dengan berkata "*Datanglah ke kantor saya, maka saya akan perlihatkan bagaimana caranya,*" kata Salah kepada jurnalis perempuan itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Presiden Mesir Tunjuk Wanita Jadi Wapres*. Di akses 23/05/2013  
<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/06/28/presiden-mesir-tunjuk-wanita-jadi-wapres/>

Tindakan yang dilakukan oleh menteri tersebut tanpa rasa bersalah dan memicu kemarahan yang sangat besar bagi yang menyaksikannya. Tindakan pelecehan seksual oleh kaum pria yang tidak bertanggung jawab tersebut dilakukan kepada kaum perempuan tanpa batasan umur dan tidak memandang pakaian yang digunakan. Mereka melakukan aksinya kepada siapa saja kaum perempuan yang berjalan ditempat umum. Dengan mengenakan hijab dan pakaian muslimah yang mengenakan cadar atau *niqab purdah* sebagai cara untuk mencegah kekerasan seksual ini bahkan tidak dapat menyelesaikan dan tidak dapat melindungi kaum perempuan Mesir untuk berada ditempat umum. Namun, kaum perempuan itu tetap mendapatkan perlakuan yang sama dan dilakukan hampir setiap hari.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka muncul pokok permasalahan yaitu Mengapa Pada Masa Pemerintahan Mursi Gagal Menyelesaikan Problem Kekerasan Terhadap Perempuan ?

---

<sup>26</sup> *Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama*. Di akses Di akses 28/05/2013  
<http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html>

<sup>26</sup> *Konstitusi Baru Mesir Jamin HAM, Hak Minoritas, dan Perempuan*. di akses 27/05/2013  
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/27/infntwo-konstitusi-baru-mesir-jamin-ham-hak-minoritas-dan-perempuan>

## E. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menggunakan kerangka teori yakni Konsep Equality dan Teori Gender :

### 1. Konsep Equality

Dalam kehidupan manusia, Equality atau persamaan hak sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Persamaan (hak) adalah sesuatu yang mutlak harus di terima oleh orang banyak. Persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir. Persamaan hak itu ada bermacam-macam, seperti persamaan hak antara kaum pria dan wanita, persamaan hak dalam pekerjaan atau profesi, dan lain-lain.<sup>27</sup> Jika ada sekelompok orang dimana mereka tidak mendapatkan persamaan haknya, maka sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap. Sehingga munculnya *inequality* Seperti halnya yang terjadi pada kaum perempuan di Mesir yang mana berusaha mendapatkan perlakuan yang sama di lingkungan masyarakat yang lebih baik dari pemerintah sebelumnya.

*Inequality* adalah sebuah hal yang muncul dari akibat kesenjangan sosial yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi pada masyarakat yang termarginalkan yang marak terjadi pada masa pemerintahan Mursi dalam bidang sosial budaya yakni tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang berbasis gender yang ditujukan pada perempuan, yang mengakibatkan atau

---

<sup>27</sup> PERSAMAAN HAK. Diakses 31/05/2013  
<http://jenlight-jenlight.blogspot.com/2011/11/persamaan-hak.html>

mungkin akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis; termasuk tindakan mengancam, memaksa atau membatasi kebebasan; baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik.<sup>28</sup> Kekerasan perempuan yang terjadi di Mesir berupa sebuah pelecehan seksual yang berujung pemerkosaan yang terjadi di tempat umum dan pelecehan tersebut menimpa perempuan dari kalangan remaja hingga dewasa. Hal tersebut dilakukan oleh individu bahkan sekelompok orang yang muncul secara tiba-tiba. Sebagai warga negara Mesir saat ini memang kaum perempuan semakin terpinggirkan. Dilihat juga dari keadaan ekonomi yang muncul di Mesir saat ini yakni terjadinya Inflasi dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok merupakan fenomena sosial yang muncul dari ketidakamanan di Mesir.

Dalam pengertian Hak, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dan berhak menjadi milik pribadi seseorang. Seperti hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>29</sup> Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat di ubah. Sebagai warga negara sudah seharusnya setiap orang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, jabatan dan sebagainya. Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip fundamental yang mana bahwa semua manusia memiliki martabat yang *intern* tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa,

---

<sup>28</sup> Declaration on the elimination on violence against women; passed by UN General Assembly, 1993.

<sup>29</sup> *Pengertian dan Definisi Hak*. Diakses 07/05/2013  
<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289969-pengertian-dan-definisi-hak/>

agama dan sebagainya.<sup>30</sup> Hak Asasi Perempuan di Dunia memiliki Jenis dan

Macam. seperti :

a) Hak asasi pribadi (*Personal Right*)

- i. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
- ii. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- iii. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- iv. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

b) Hak asasi perempuan dalam berpolitik

- i. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- ii. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- iii. Hak membuat organisasi politik lainnya
- iv. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

c) Hak asasi perempuan dalam hukum

- i. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- ii. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil
- iii. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

d) Hak asasi perempuan dalam ekonomi

- i. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- ii. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

<sup>30</sup> Mh. Yasir Alimi, DKK, "Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan", LKIS 1999, Hal 13. (BAB II : Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia). Diakses 07/05/2013  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26655/3/Chapter%20II.pdf>

- iii. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
- iv. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- e) Hak Asasi perempuan dalam mendapatkan peradilan
  - i. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
  - ii. Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum
- f) Hak asasi perempuan dalam sosial budaya
  - i. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  - ii. Hak mendapatkan pengajaran untuk pengalaman
  - iii. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat<sup>31</sup>

Hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993. Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam hal ini bukan hanya pihak-pihak tersebut yang memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak perempuan melainkan setiap warga negara juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaannya yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus

<sup>31</sup> BAB II (Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia). Di akses 07/05/2013  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26655/3/Chapter%20II.pdf>

mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan ingin mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.<sup>32</sup>

Pada masa pemerintahan Mohammed Mursi saat ini perempuan Mesir masih saja mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum seperti di Tahrir Square. Tahrir Square merupakan lapangan terbuka yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Namun, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah melakukan tindakan pelecehan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan bukan hanya oleh satu orang melainkan oleh kelompok dengan jumlah yang banyak untuk melakukan aksinya. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi perempuan.

Kekerasan seksual yang terjadi di Mesir termasuk pelanggaran hak asasi perempuan yang sesungguhnya puncak suatu krisis jaminan hak konstitusional atas rasa aman, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi terhadap warga negara, terutama perempuan. Banyaknya korban kekerasan seksual khususnya pemerkosaan di picu oleh lemahnya penegak hukum yang menyebabkan terus berlanjutnya kasus pelaku kekerasan seksual di masa pemerintahan Mohammed Mursi. Sedangkan perilaku aparat negara dan penyelenggara hukum yang meremehkan persoalan pemerkosaan dan turut mempersalahkan korban atau bahkan menjadi pelaku tindak kekerasan. Dan dukungan yang terbatas bagi lembaga-lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan.<sup>33</sup> *Equality*

---

<sup>32</sup> *Hak-Hak Perempuan* (akbar muzakir). Di akses 11/05/2013

<http://akbarmuzaqir.blogspot.com/2013/04/hak-hak-perempuan.html>

<sup>33</sup> *Pelanggaran Hak asasi Perempuan* (mardety mardinyah centre). Di akses 10/05/2013

<http://www.mardetynardinyah.com/2013/04/01/pelanggaran-hak-asasi-perempuan/>

(persamaan:hak) terhadap perempuan sangat dibutuhkan di Mesir karena setiap perempuan juga mempunyai hak.

## 2. Teori Gender

Menurut Elaine Showalter, *gender* adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.<sup>34</sup> Kebanyakan orang berfikir bahwa gender merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Padahal, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis merupakan *sex*. *Sex* bersifat permanen atau tidak dapat dirubah dan memiliki simbol. Sementara gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosiologis. Gender sendiri berarti perilaku dan harapan yang dipelajari secara sosial yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas.<sup>35</sup> Perbedaan gender sebenarnya lahir dari konsep dasar manusia bahwa kaum perempuan lebih lemah dan halus daripada kaum laki-laki. Karena itulah laki-laki selalu mengerjakan pekerjaan yang berat dan kasar dan kaum perempuan kerap kali diragukan dalam hal kepemimpinan.

Dalam sejarah perbedaan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan melalui proses dan dibentuk oleh beberapa sebab yaitu kondisi sosial, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. sehingga, perbedaan gender dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat seolah-olah biologis yang tidak

<sup>34</sup> KAJIAN AWAL TENTANG TEORI-TEORI GENDER oleh Marzuki. Showalter, Elaine (ed.) (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge. Di akses 27/062013  
<http://www.scribd.com/doc/74895982/25-Kajian-Awal-Tentang-Teori-Teori-Gender>

<sup>35</sup> Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

dapat dirubah lagi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender ditengah-tengah masyarakat.<sup>36</sup>

Seperti yang terjadi di Mesir dimana kaum perempuan terlihat sangat rendah di mata kaum lelaki. Mereka hanya pantas untuk di lecehkan, keberadaan mereka hanya memberikan dampak negatif bagi kaum lelaki, sehingga muncul *disequality* terhadap perempuan di berbagai bidang. Dalam bidang sosial budaya pada pemerintah Mursi muncul kekerasan terhadap perempuan yang semakin parah dari pemerintah sebelumnya. Berbagai aksi pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di jalan-jalan Kairo, Mesir dengan berbagai cara seperti siulan yang diberikan dengan sengaja kepada kaum perempuan yang lewat dihadapan mereka. Hal ini pun dilakukan oleh individu bahkan oleh sekelompok laki-laki yang dengan tega memperkosa bagi kaum perempuan yang melawan. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak memandang siapa yang dilecehkan, kaum perempuan yang berpakaian mengenakan hijab bahkan niqab pun dilecehkannya dan ditawarkan dengan harga.

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Namun Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Adapun teori ini memiliki barbagai macam aliran feminisme dan salah satunya adalah **Feminisme Sosialis**.

---

<sup>36</sup>KAJIAN AWAL TENTANG TEORI-TEORI GENDER oleh Marzuki. Di akses 27/06/2013  
<http://www.scribd.com/doc/74895982/25-Kajian-Awal-Tentang-Teori-Teori-Gender>

Feminisme Sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme marxis. feminisme sosialis mengatakan bahwa " Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme ". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapus sistem kepemilikan. Lembaga perkawinan yang menyetujui kepemilikan kaum laki-laki atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide dari Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa perbedaan gender. Aliran feminisme sosialis ini muncul sebelum kapitalisme dan tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh.

Feminisme Sosialis melihat partisipasi dalam politik sebagai keterlibatan aktif dari kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan hak mereka. perwujudan partisipasi politik dengan menentang pelecehan seksual, mengajukan tuntutan kelas, gender dan ras melalui berbagai kelompok dengan dasar pemikiran bahwa semuanya saling berkaitan dan memiliki efek terhadap kehidupan masyarakat luas. feminisme sosialis melihat bahwa adanya keterkaitan erat antara ekonomi, politik dan kehidupan sosial-budaya (Eatwell dan Wright; 2004).

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. namun aliran feminisme sosialis ini menyatakan bahwa feminisme radikal menganggap patriarki merupakan sumber penindasan terhadap perempuan. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengusaha

anak adalah peran feminin. nalisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.<sup>37</sup>

Bagi kaum perempuan di Mesir dalam mendapatkan *Equality* pada pemerintahan Mursi ini hanya sebagian bidang yang sudah tercapai dalam pencapaiannya, yakni dalam dunia kerja. Sekitar beberapa bulan yang lalu, telah di beritakan oleh surat kabar bahwa Pemerintah Mesir akhirnya mulai memperbolehkan kaum perempuan melakukan pekerjaan di Mesir menggunakan hijab. Bahkan juga telah diberikan kesempatan bukan hanya kaum perempuan yang mengenakan hijab, bahkan yang mengenakan *niqab* (selembar kain yang menutupi sebagian muka) untuk dapat bekerja. Kemudian kaum perempuan sudah bisa memiliki peran dalam bidang politik, yang mana telah dapat mengeluarkan suaranya untuk pemilihan umum yang ada di Mesir.

Namun dalam bidang ekonomi yang terjadi di Mesir saat ini munculnya Inflasi dan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok yang merupakan fenomena sosial yang muncul dari ketidakamanan di Mesir. Hal ini belum banyak berubah dari pemerintah sebelumnya, belum lagi dampak dari meningkatnya aksi kekerasan yang menyebabkan naiknya angka kejahatan, khususnya antara warga Mesir sendiri, termasuk dalam memperlakukan kaum perempuan. Kemudian, kondisi sosial yang tidak stabil ini membuat aksi gangguan terhadap perempuan juga semakin meningkat. Nihad Abu El-Komsan, Direktur Pusat Hak Perempuan Mesir menyebutkan instabilitas politik, ketidakamanan sosial dan kemiskinan ekonomi yang bertautan erat dengan budaya tradisi dan agama Mesir menjadi

---

<sup>37</sup> Maharani, Shinta. 2088. Pandangan Feminisme Liberal dan Feminisme Sosialis Tentang Partisipasi politik. Jakarta: Jurnal LIPi

faktor utama meluasnya krisis moral di negara ini.<sup>38</sup> Dapat dilihat batasan-batasan menurut hakekat sosial maupun ekonomi kaum perempuan yakni :

i. Batasan Ekonomi kaum perempuan

Kebijakan ekonomi telah secara negatif mempengaruhi perempuan dari segi standar kehidupan, pendapatan, serta tingkat pengangguran. Ini telah melemahkan kemampuan mereka untuk berkompetisi, karena kaum perempuan dihalangi untuk mendapat akses ke berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan yang memadai dan kaum perempuan terus tergantung kepada kaum pria secara ekonomi

ii. Batasan Sosial kaum perempuan

Undang-undang merupakan salah satu kendala sosial utama yang dihadapi perempuan. Perempuan masih mengalami diskriminasi terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, nasionalitas, hak untuk bepergian, dan hak untuk bekerja. Hal ini membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan publik<sup>39</sup>

## F. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas, pada pemerintahan Mursi saat ini *disequity* terhadap perempuan di Mesir masih saja terjadi, maka dapat ditarik hipotesa bahwa :

<sup>38</sup> *Dampak Sosial Ketegangan Politik Mesir*. Diakses 20/04/2013

[http://indonesian.irib.ir/hidden-17/-/asset\\_publisher/Pfp0/content/dampak-sosial-ketegangan-politik-di-mesir](http://indonesian.irib.ir/hidden-17/-/asset_publisher/Pfp0/content/dampak-sosial-ketegangan-politik-di-mesir)

<sup>39</sup> *Mencari Kekuasaan Politik-Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon*. Diakses 28/062013

[http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS\\_Egypt\\_Libanon\\_Jordan.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Libanon_Jordan.pdf)

Ekonomi yang buruk membuat warga hidup dalam kondisi yang sulit dan memprihatinkan dan berkaitan dengan ini meningkatnya aksi kekerasan yang menyebabkan naiknya angka kejahatan, khususnya dalam memperlakukan kaum perempuan dan hukum serta keamanan yang dinilai masih belum cukup bisa menangani kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Mesir

### **G. Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi dalam penulisan ini dengan mempersempit masalah yang akan dikaji, hal ini diharapkan agar penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan maupun telah dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulisan membatasi penelitian ini berkisar antara tahun 2009-2013, dimana pada tahun-tahun tersebut terdapat peristiwa *disequality* dari berbagai bidang dari masa pemerintahan Hosni Mubarak hingga pasca pemerintahannya.

### **H. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data akan diambil dari berbagai sumber, yaitu :

1. Buku-buku ilmiah atau hasil penelitian
2. Dokumen-dokumen
3. Jurnal, majalah, surat kabar, internet, dan media lainnya yang relevan dengan objek penelitian

## I. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan yang didalamnya akan membahas mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakan masalah, kerangka dasar teori, metode pengumpulan data dan sistematika pemulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini akan membahas tentang hak-hak perempuan Mesir, fakta-fakta *disequality* atau peran kaum perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik terhadap kaum perempuan yang terjadi pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, serta dampak yang di timbulkan dari adanya *disequality* terhadap perempuan
- BAB III** : Dalam bab ini akan membahas tentang adanya perubahan apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan Mursi, membahas tentang peran kaum perempuan pada masa pemerintahan Mursi,
- BAB IV** : Dalam bab ini akan membahas tentang kegagalan pemerintah Mursi pasca Mubarak dalam mengatasi *disequality* terhadap perempuan dalam hal kekerasan terhadap perempuan, penyebab kegagalan hal tersebut, peran pemerintah dalam menangani hal tersebut
- BAB V** : Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah di kaji dalam bab-bab sebelumnya

